

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BAHAN BAKAR MINYAK NON SUBSIDI BAGI MOBIL DINAS DI KABUPATEN PINRANG

SAFRIANI¹, ABDUL KADIR ADYS², MUHAMMAD TAHIR³

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

²Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

³Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

ABSTRACT

This research aimed an overview of how the implementation of non subsidized fuel policy for agency cars in pinrang regency. The kind of research was used descriptive qualitative approach with the educated people who have knowledge and information concerning with the set of problems researched. The technique of the data collection was done by using observation, interview and documentation. The results showed that the implementation of non subsidized fuel policy for agency cars in pinrang was not effective. It happened because most of the agency cars are still used premium fuel .

Keywords :policy implementation, non subsidized fuel.

ABSRTAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimanan implementasi kebijakan bahan bakar minyak nonsubsidi bagi mobil dinas dikabupaten pinrang. Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan orang-orang yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi bagi mobil dinas di Kabupaten Pinrang belum berjalan efektif sesuai aturan. Hal tersebut terjadi karena masih banyak pengguna mobil dinas menggunakan Bahan Bakar Minyak premium.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, bahan bakar minyak non subsidi.

PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak merupakan kebutuhan strategi bagi masyarakat di Desamaupun di Kota baik kebutuhan rumahtangga, sector industry maupun transportasi. Berdasarkan fenomena diatas sebagai akumulasi/pertimbangan, akibat kurang stabilnya produk minyak bumi, sehingga pemerintah berupaya mengendalikan penggunaan Bahan Bakar Minyak melalui pembatasan BBM bersubsidi/jenis BBM tertentu. Upaya yang dilakukan pemeritah dimulai dengan seluruh mobil dinas telah diwajibkan tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi untuk mengantisipasi kelangkaan BBM termasuk BBM bersubsidi yang menyedot anggaran yang cukup besar.

Sesuai dalam PERMEN ESDM RI Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang merupakan penegasan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Penggunaan Jenis BBM tertentu, serta merupakan kelanjutan dari PERMEN ESDM No.12/2012 yang sebelumnya telah

melarang kendaraan dinas menggunakan premium, serta solar bagi kendaraan perusahaan perkebunan dan pertambangan serta Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 kendaraan dinas yang dioperasikan pemerintah pusat, instansi vertikal, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), diserukan untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) Non-subsidi.

Kebijakan tersebut telah disosialisasikan ke Sulawesi selatan meliputi Badan-badan Usaha Pelaksana Penyedia dan Pendistribusian BBM subsidi. Kebijakan ini bukan keputusan sepihak karena telah dibahas dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam rangka sosialisasi yang di landasi dengan Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor 541/30/49 ESDM Tahun 2013 yang menjadi landasan kebijakan tersebut dibuat. Pertamina juga telah menyiapkan Spanduk untuk setiap SPBU dan pengumuman.

Berdasarkan observasi awal yang menjadi dasar pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian yang berfokus pada implementasi kebijakan bahan bakar minyak non subsidi bagi mobil dinas terkait dengan Komonikasi; belum jelas pemahaman dan pengertian pihak personalia, SPBU dan Masyarakat terhadap Kebijakan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Bagi Mobil Dinas, Permasalahan terkait dengan Sumber Daya; terbatasnya fasilitas pompa bensin / pompa tangki berjenis pertamax pada setiap SPBU, kurangnya stok BBM jenis pertamax, terbatasnya anggaran yang disiapkan pemerintah APBD/APBN yang di peruntukkan dalam memenuhi pengadaan bahan bakar minyak bagi mobil dinas yang menggunakan jenis pertamax karena menggunakan jenis pertamax lebih mahal dari premium, kemudian terkait dengan disposisi atau watak yaitu sikap personalia yang memiliki komitmen yang kurang dalam melaksanakan kebijakan bahan bakar minyak non subsidi kurangnya kejujuran personalia yang masih memilih penggunaan BBM premium di

bandingkan menggunakan jenis pertamax dengan pertimbangan harga yang agak mahal dari premium.

Secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Seorang pakar politik lain, Richard Rose, dalam Faried ali (2012:13) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Menurut Anderson dalam Riant Nugroho (2012:119) kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berhubungan dengan suatu masalah atau persoalan.

Dye dalam Madani (2011:19). Menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup pilihan-pilihan fundamental dari pemerintah untuk

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan bahwa keputusan tersebut di buat oleh pegawai pemerintah dan atau lembaga pemerintahan.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji dalam Wahab (2002:59) dengan tegas mengatakan bahwa (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Definisi lain yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah Van Meter dan Van Horn dalam Mustari (2010: 127), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai:Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Kemudian George C.Edwards III dalam (Agustino,2012: 151) menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *direct and inderect impact on implementation*. Yang menjelaskan ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan, diantaranya yaitu : faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi atau kecenderungan pelaksana. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu: transmisi,konsisten dan kejelasan. Sumber daya mencakup: staff,anggaran,fasilitas,informasi dan kewenangan. Dan Disposisi.

Menurut Subarsono (2013:13) Subsidi adalah semua bantuan finansial pemerintah kepada individu, perusahaan, dan organisasi. Maksud subsidi adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan terhadap aktivitas.BBM Subsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyat dengan harga di bawah harga bahan bakar dunia. Hal ini dikarenakan rakyat telah

mendapatkan bantuan dana dalam bentuk potongan harga sebelum BBM sampai ke tangan konsumen. Jenis BBM Subsidi terdiri dari Premium, Minyak Tanah, Minyak Solar, Biosolar. Sedangkan jenis BBM Non Subsidi terdiri dari: Pertamina, Pertamina Plus, Bio Pertamina, dan Pertamina Dex.

METODE PENELITIAN

Waktu yang dilakukan penelitian ini, yakni kurang lebih 2 (dua) bulan, terhitung mulai 27 juni 2015 sampai 27 Agustus 2015 setelah seminar proposal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian mengacu pada masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan Dokumentasi sebagai data pendukung. Pengabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi yang terbagi menjadi tiga yaitu: (1) triangulasi sumber; (2) triangulasi teknik; (3) triangulasi waktu. Data

yang diperoleh dari lokasi penelitian pada dasarnya merupakan data mentah. Data tersebut merupakan hasil yang perlu yang perlu diolah kembali dengan hasilnya diuraikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi kebijakan BBM non subsidi bagi mobil dinas di kabupaten pinrang dan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pada implementasi kebijakan BBM non subsidi bagi mobil dinas di kabupaten pinrang. Dari data tersebut, dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan observasi dan wawancara. Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan sebanyak 7 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pelaksanaan kebijakan bahan bakar minyak non subsidi bagi mobil dinas di kabupaten pinrang yang dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan didukung oleh beberapa dokumen. Dimana pertanyaan yang digunakan dalam bentuk wawancara dan memperoleh

respon pertanyaan yang positif dari

Peran instansi pemerintah daerah dan jajarannya serta BUMN Kabupaten Pinrang dalam implementasi kebijakan BBM non subsidi bagi mobil dinas yang diperuntukkan dalam memenuhi pengadaan BBM non subsidi ini sangat mutlak di kontrol apakah pelaksanaannya berjalan atau tidak karena pembengkakan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran pendapatan belanja negara sangat bergantung dengan konsistennya pengguna kendaraan dinas dalam melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan PERMEN Energi Sumber Daya Mineral No 01 Tahun 2013 tentang penggunaan BBM non Subsidi bagi mobil dinas. Berdasarkan realita tentang implementasi kebijakan BBM non subsidi bagi mobil dinas kabupaten pinrang maka diperlukan upaya yang kongkrit dalam pelaksanaan kebijakan publik bagi masyarakat sehingga tidak membingungkan.

Pelaksanaan kebijakan di seluruh instansi di kabupaten pinrang merupakan tuntutan dan harapan masyarakat kedepannya lebih baik,

para responden.

karena apabila pelaksanaan kebijakan diterapkan dengan baik maka respon masyarakat kedepannya akan baik pula. Oleh karena itu sudah sewajarnya penanggung jawab pelaksana kebijakan dan pengguna mobil dinas diseluruh instansi kabupaten pinrang memberikan contoh yang baik dengan mengembangkan komunikasi, sumber daya dan disposisi.

Sebagai mana kita ketahui bahwa Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun

harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi atau pentransmisian informasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. terutama penyaluran komunikasi tentang kebijakan ESDM No 01 Tahun 2013 tentang penggunaan BBM non subsidi bagi mobil dinas, melalui sosialisasi dan rapat pertemuan, pemasangan pamflet, pembagian nota pembelian BBM non subsidi setiap kali perjalanan dinas, media cetak dan sosial. Jika pelaksanaannya baik dalam penyaluran komunikasi maka akan menghasilkan kebijakan yang baik pula, menurut Edward III yaitu dimana suatu implementasi kebijakan yang baik adalah efek dari penyaluran komunikasi yang terlaksana dengan baik pula.

Akan tetapi hubungan komunikasi pengguna mobil dinas dengan pengelola SPBU dalam pelaksanaan Keputusan Menteri masih kurang baik karena masih kebijakan adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan

banyak diluar yang masih mementingkan keegoisan demi kepentingan pribadi sehingga pengelola SPBU lah yang jadi korban kekerasan yang dibuat pengguna mobil dinas dan bisa dikatakan hanya sebagian dari mereka yang menjalankan sesuai aturan PERMEN ESDM No 01 Tahun 2013 tentang penggunaan BBM non subsidi bagi mobil dinas di kabupaten pinrang, oleh karena itu pentingnya terjalin komunikasi ,dimana ketika terjalin hubungan yang baik antara pengguna mobil dinas dengan pengelola SPBU maka terlaksanalah kebijakan tersebut sesuai tujuan yang ingin dicapai sebelumnya sehingga mempermudah mengurangi pembengkakan anggaran APBN/APBD.

Sedangkan kejelasan komunikasi yaitu komunikasi yang diterima dari pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/Mendua). Faktor kedua yang berpengaruh terhadap komunikasi diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan maka petunjuk-

petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidak jelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Kejelasan komunikasi yang diterima pelaksana kebijakan sangat jelas tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Pelaksanaan kebijakan sudah menjalankan sesuai Peraturan Menteri No 01 Tahun 2013 tentang Penggunaan BBM non subsidi bagi mobil dinas, serta pelaksanaan kebijakan mengerti melalui media dan surat kabar.

Konsisten perintah yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan haruslah konsisten/tidak berubah-ubah dan jelas (untuk ditetapkan dan dijalankan). Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun

perintah tersebut mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi yang lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidak efektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

Kendala kedua yang timbul yaitu ke konsistensinya pelaksanaan kebijakan yang masih kurang karena hanya sebagian dari pelaksanaan kebijakan yang menjalankan sesuai aturan, pelaksanaan kebijakan sudah memahami dengan jelas cara penyaluran komunikasi melalui sosialisasi, pemasangan pamflet di setiap SPBU, dari sisi kejelasan pelaksana kebijakan menerima dengan jelas dan tidak

mbingungkan, tapi dari segi kekonsistenan mereka para pelaksana seakan-akan masi kurang pemahamannya tentang peraturan yang ada pengelola SPBU mengatakan tidak semuanya konsisten karena sebagian dari mereka menggati plat merah menjadi hitam dan setiap kali pengisian merekalah yang menentukan pengisiannya ketika pengelola SPBU memberitahukan kebijakan bahwa adanya Peraturan Mentri Energi Sumber Daya Mineral No 01 Tahun 2013 tentang penggunaan BBM non subsidi bagi mobil dinas, pelaksana kebijakan menolak dengan suara keras bahkan mereka kadang menggunakan kekerasan sehingga si pengelola SPBU kewalahan dan takut sehingga dengan keterpaksaan pengelola SPBU memberikan BahanBakarMinyak premium.

Faktor sumber daya Sumber daya berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan bahan bakar minyak non subsidi bagi mobil dinas, Sumber daya ini mencakup beberapa indikator yang menjadi alat

ukur tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan yang ditemukan peneliti dilapangan mengenai sumber daya mineral penulis menyimpulkan bahwa kemampuan dan keahlian staf dalam menjalankan kebijakan sangat terampil disamping memeberikan nota pesanan pengambilan BBM pada pengguna kendaraan dinas operasional, juga diadakan bimbingan teknik oleh instansi terkait dimana setiap tahunnya mengadakan pelatihan tentang kebijakan tersebut, kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan sumber daya manusia maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Dilihat dari kualitasnya sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Informasi yang di peroleh selaku perpanjangan tangan dari PERMEN ESDM tersebut memperoleh informasi dari pusat(sosialisasi) media cetak, media elektronik, dan pemasangan pamflet yang disebarakan di setiap instansi dan SPBU, serta melalui staf yang

membidangi perlengkapan nota BBM yang sudah bekerjasama dengan pihak pengelola SPBU.

Informasi adalah salah satu sumber daya yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber-sumber informasi sangat dibutuhkan untuk memperoleh data baik mengenai bagaimana cara melaksanakan kebijakan BBM non subsidi bagi mobil dinas maupun dari penggunaan dan pengelola pelaksanaan kebijakan tersebut, dari beberapa informan berpendapat bahwa informasi yang diperoleh melalui media sosial dan cetak bahkan surat edaran ESDM.

Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai yang di kehendaki. Dari hasil wawancara mengenai wewenang dapat dianalisis bahwa kewenangan belum berjalan dengan efektif ini dapat dilihat belum semua pengguna mobil dinas menggunakan BBM non subsidi sesuai aturan KEPMEN No 01 Tahun 2013. tertentu, namun masih banyak yang tidak

melaksanakan suatu kebijakan hanya demi kepentingan pribadi .

Anggaran yang menjadi faktor pendukung, dengan pengadaan anggaran sudah menjadi faktor pendukung dalam terlaksananya kebijakan Bahan Bakar Minyak non Subsidi bagi mobil dinas dalam penggunaan bahan bakar minyak non subsidi bagi mobil dinas informan mengatakan bahwa sangat membantu setiap kali perjalanan dinas dan pribadi. Efektifitas pengadaan anggaran sangat menunjang terlaksananya kebijakan dengan pengadaan mobil dinas sehingga mempermudah para personil setiap kali perjalanan dinas atau perjalanan pribadi. Hal ini terlihat bahwa dengan semakin bertambahnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan dinas dan pribadi akan mempermudah terlaksananya segala kegiatan baik di kantor maupun diluar kantor. Ini sependapat yang di kemukakan Edward III bahwa anggaran pada implementasi kebijakan berkaitan dengan ketercukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya

kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Melalui penyaluran anggaran yang disiapkan pemerintah dalam memenuhi pengadaan BBM non subsidi bagi mobil dinas hanya sebagian yang mengatakan sudah tercukupi namun masih ada diantaranya masih mengeluh karena tidak tercukupinya anggaran yang diberikan kepada pihak pengguna, jadi anggaran pada implementasi kebijakan berkaitan dengan ketercukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan tidak sesuai, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Fasilitas yang berkaitan dengan kendaraan sudah menjadi faktor pendukung karena

mengingat kendaraan yang diperuntukkan adalah kendaraan dinas operasional yang menunjang setiap kali perjalanan dinas, namun masih ada yang menyalahgunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi seperti perjalanan ke tempat wisata, pengantinl. Ini belum bisa dikatakan efektif. Sedangkan fasilitas yang berkaitan dengan pompa bensin belum tercukupi sebagaimana pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan, namun fasilitas yang berkaitan dengan pompa bensin pertamax masih perlu penambahan fasilitas pertamax karena hanya sebagian SPBU di kabupaten pinrang yang memfasilitasi pompa khusus pertamax, serta masih banyak pompa bensin yang tidak berfungsi disebabkan stok pengiriman yang kurang. Tanpa adanya fasilitas pendukung maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berhasil sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Faktordisposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dan pelaksana kebijakan berperang penting untuk

mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah di gariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjelaskan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Perilaku pengguna mobil dinas dalam melaksanakan kebijakan ESDM hanya sebagian yang berperilaku baik sesuai aturan yang ada, akan tetapi masih ada yang belum konsisten terhadap kebijakan

peraturan menteri ESDM, seperti pengguna beralih ke premium ketika stok khusus pertamax lagi kosong, pengaruh pengguna kendaraan beralih ke premium disebabkan signifikan harga antara premium dengan pertamax jauh berbeda, dari itu kita dapat melihat yang tertera diatas seluruh instansi yang ada sudah mengerti maksud dan tujuan kebijakan tersebut di buat.

Insentif adalah kompensasi khusus yang dirancang untuk memotivasi kinerja luar biasa (*superior performance*). Pemberian insentif tidak terlalu mempengaruhi kinerja mereka. Hal ini didasarkan pada kinerja staf yang konsisten dan amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah di bebaskan kepadanya menggunakan uang pribadi dalam pengisian sehingga pengguna beralih ke BBM premium karena masih kurangnya anggaran yang disiapkan pemerintah setempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai implementasi kebijakan

Bahan Bakar Minyak Bagi Mobil Non Subsidi Bagi Mobil Dinas Di Kabupaten Pinrang maka kesimpulan pada penelitian ini adalah:

Faktor komunikasi yaitu masih diperlukannya peningkatan komunikasi dalam pelaksanaan keputusan menteri bagi penggunaan mobil dinas, hal ini dapat di lihat dengan banyaknya pengguna mobil dinas yang tidak mematuhi aturan yang ditentukan seperti tidak konsistensinya dalam menjalankan kebijakan tersebut disebabkan banyak penggunaan mobil dinas mengganti plat dan banyaknya penggunaan mobil berplat merah yang masih member minum kendaraan mereka dengan bensin bersubsidi dikarenakan perbedaan harga yang signifikan dengan bahan bakar minyak non subsidi.

Dari sisi Faktor sumber daya dapat dilihat terbatasnya fasilitas pompa bensin/pompa tangki berjenis pertamax pada setiap SPBU, kurangnya stok Bahan Bakar Minyak jenis pertamax, terbatasnya anggaran yang disiapkan pemerintah ini dapat dilihat sebagian dari pengguna mobil dinas masih banyak yang mengeluh.

Kemudian Faktor disposisi dimana perilaku pengguna Mobil Dinas sudah mengerti maksud dan tujuan

kebijakan tersebut tetapi masih banyaknya sikap personalia yang memiliki komitmen yang kurang dalam melaksanakan kebijakan bahan bakar minyak non subsidi bagi mobil dinas dan pemberian insentif dapat mempengaruhi kinerja karena tidak semua Staf memiliki kendaraan yang memadai sehingga dengan adanya insentif kendaraan maka mempermudah personalia dalam melaksanakan kunjungan ke masing-masing instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mustari, Nuryanti. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik Pemahaman Teoritis Empiris*, Makassar: Membumi Publishing.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy Teori Kebijakan, Analisis*

- Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan Publik.*
Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, S, Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara,* Jakarta : Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia. *Nomor. 01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.*
- Peraturan Presiden. *No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran Dan Dokumen Penggunaan Bahan Bakar Minyak Tertentu.*
- Peraturan Menteri ESDM. *Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Larangan Bagi Kenda*
- raan Dinas Menggunakan Premium, Serta Solar Bagi Kendaraan Perusahaan Perkebunan Dan Pertambangan.*
- Peraturan Presiden. *No. 15 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Dinas Yang Dioperasikan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Daerah (BUMN Dan BUMD), Diserukan Untuk Menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi.*
- Surat Edaran Gubernur Sulsel. *No 541/30/49ESDM Tahun 2013.*